

Peranan Tokoh Masyarakat Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Pada Proses Pembangunan Desa

Aldo Jonatan Hadinaung^{1,*}, Ventje Tamowangkay², Trintje Lambey³

^{1,2,3} Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sam Ratulangi - Indonesia

*Corresponding Author: nokdispauwn@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini mengidentifikasi bagaimana peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada proses pembangunan di Desa Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe. Dengan menggunakan metode kualitatif, peran tokoh masyarakat ini dikaji dengan menggunakan pendekatan yang dikemukakan oleh Adi Isbandi Rukminto (2001), tentang bagaimana keterlibatan masyarakat dalam tahapan pembangunan yaitu: tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan, dan tahapan evaluasi. Temuan penelitian menggambarkan bahwa keterlibatan tokoh masyarakat dalam proses pembangunan di Desa Bebu Kecamatan Tamako sudah dimulai sejak awal yaitu dalam proses perencanaan program, penetapan program alternatif, pelaksanaan program, hingga proses evaluasi. Namun efek dari keterlibatan tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat desa Bebu belum maksimal karena tokoh masyarakat tidak bisa menyakinkan masyarakat untuk mau berpartisipasi secara sukarela. Hal itu terlihat dari banyaknya orang yang berasal dari luar desa yang justru terlibat dalam proses pengerjaan proyek pembangunan yang ada di Desa Bebu.

Kata Kunci: Tokoh Masyarakat; Partisipasi; Pembangunan Desa

ABSTRACT

This article identifies the role of community leaders in increasing community participation in the development process in Bebu Village, Tamako District, Sangihe Islands Regency. By using a qualitative method, the role of community leaders is examined using the approach proposed by Adi Isbandi Rukminto (2001), about how community involvement in the development stages is: the planning stage, the implementation stage, and the evaluation stage. The research findings illustrate that the involvement of community leaders in the development process in Bebu Village, Tamako District, has started from the beginning, namely in the program planning process, determining alternative programs, implementing programs, to the evaluation process. However, the effect of the involvement of community leaders in increasing the participation of the Bebu village community has not been maximized because community leaders cannot convince the community to participate voluntarily. This can be seen from the number of people who come from outside the village who are actually involved in the process of working on development projects in Bebu Village.

Keywords: Community Leaders; Participation; Village Development

PENDAHULUAN

Paradigma pembangunan yang sekarang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan. Artinya, pemerintah tidak lagi sebagai provider dan pelaksana, melainkan lebih berperan sebagai fasilitator dan katalisator dari dinamika pembangunan, sehingga dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan, masyarakat mempunyai hak untuk terlibat dan memberikan masukan dalam mengambil keputusan. Pembangunan tidak akan bergerak maju apabila salah satu dari tiga komponen tata pemerintahan (pemerintah, masyarakat, swasta)

tidak berperan atau berfungsi. Karena itu, proses perencanaan pembangunan harus secara partisipatif dimana, merupakan pendidikan warga agar menjadi bagian aktif dari tata pemerintahan dan pembangunan.

Partisipasi publik dalam kebijakan pembangunan di negara-negara yang menerapkan demokrasi termasuk di Indonesia bukanlah hal yang baru. Sebagai suatu konsep dan praktek pembangunan, konsep partisipasi baru dibicarakan pada tahun 60-an ketika berbagai lembaga internasional mempromosikan partisipasi dalam praktek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Di Indonesia, landasan hukum pelaksanaan partisipasi masyarakat adalah UUD 1945 yang menyebutkan bahwa partisipasi adalah hak dasar warga negara, dan partisipasi politik sebagai prinsip dasar demokrasi.

Dalam Pasal 78 ayat 1 dan 2 UU No. 6 Tahun 2014 dikatakan Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan..

Partisipasi memiliki maksud dasar menjadi instrument yang memberikan peluang yang besar bagi masyarakat untuk dapat berkembang sesuai dengan potensinya, terlibat aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan, sehingga pihaknya dapat menikmati mamfaat dari kebijakan, yang dibuat pihak pemerintah.

Karena peran masyarakat sangat penting dimana masyarakat yang tahu apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat tersebut. Maka di dalam setiap suatu pembangunan untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera bagi masyarakat sangat dibutuhkan keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan, karena proses perencanaan dalam suatu kegiatan merupakan hal yang sangat penting dimana tahap perencanaan sebagai tahap penentuan keputusan yang akan diambil. Kesalahan dalam perencanaan dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan dalam mengambil keputusan. Maka dengan melibatkan masyarakat dalam pembuatan kebijakan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk menentukan sendiri apa yang menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Penyertaan masyarakat sebagai subjek pembangunan adalah suatu keniscayaan dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Ini berarti masyarakat diberi peluang untuk berperan aktif mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi setiap tahap pembangunan infrastruktur yang diprogramkan. Terlebih apabila kita akan melakukan pendekatan pembangun dengan semangat lokalitas.

Namun jika kita melihat ke belakang, bahwa mulai dari tahap perencanaan pembangunan yang menggunakan pola berjenjang dari bawah ke atas (Bottom-Up) ternyata tidak banyak menjanjikan aspirasi murni warga desa didengar. Begitu pun halnya dalam pelaksanaan proyeknya yang masih menggunakan sistem tender, di mana tender yang dimaksud melibatkan para kontraktor sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang basisnya tentu berada di desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa, ternyata keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan hanya selesai pada tahap perencanaan yang pada tahap itu pun masih banyak langkah-langkah yang belum terlaksana dengan baik, sehingga implementasi pola tersebut dapat dikritisi mengandung banyak kelemahan. Misalnya, partisipasi masyarakat selaku penerima manfaat sangat lemah, hasil dari berbagai forum koordinasi di tingkat lebih rendah kadang tidak digubris oleh pemerintah yang lebih tinggi, mekanisme perencanaan mulai dari musrenbang desa hanya bersifat mencatat daftar kebutuhan masyarakat ketimbang sebagai proses perencanaan yang partisipatif. Proses tersebut akhirnya menjadi proses birokratis yang sangat panjang dan lama, sehingga masyarakat tidak mendapat kepastian kapan kebutuhannya akan terwujud.

Di dalam kehidupan masyarakat ada peran tokoh tertentu yang menjadi penggerak. Tokoh masyarakat adalah orang-orang yang memiliki pengaruh, dan ada yang bersifat formal dan informal. Tokoh masyarakat yang bersifat formal adalah orang-orang yang diangkat dan dipilih

oleh lembaga negara dan bersifat struktural, seperti camat, lurah. Sedangkan tokoh masyarakat yang bersifat informal adalah orang-orang yang diakui oleh masyarakat karena di pandang pantas menjadi pemimpin yang disegani dan berperan besar dalam memimpin dan mengayomi masyarakat.

Keberadaan peran tokoh masyarakat dalam masyarakat desa sangat dibutuhkan, hal ini sebagai wujud dari partisipasi kewargaan para tokoh masyarakat tersebut. Tokoh masyarakat sebagai titik sentral dalam perwujudan desa yang baik sudah barang tentu keberadaannya sangat dibutuhkan dalam upaya pengembangan desa yang baik. Sebab keberadaan tokoh serta perannya sangat berpengaruh dalam perkembangan sebuah wilayah desa, oleh sebab itu keberadaannya menjadi salah satu faktor penunjang dalam pengembangan sebuah desa.

Desa Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Sangihe merupakan salah satu desa yang berkembang dan membangun pada setiap tahunnya melalui sumber keuangan desa yang tersedia, namun dari pengamatan peneliti, peneliti melihat bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan begitu rendah, hal ini terlihat pada beberapa proyek pembangunan masih menggunakan Tenaga dari luar desa, sehingga terlihat partisipasi masyarakat cukup rendah dalam pembangunan, oleh sebab itu dibutuhkan peran dari tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi pembangunan, namun sejauh ini apa yang diharapkan belum begitu baik dan efektif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Peranan

Kata peranan ini sebenarnya menunjukkan pada aktifitas yang dilakukan seseorang untuk melakukan sesuatu dalam kelompok masyarakat. Apabila seseorang tidak melakukan apa-apa dalam suatu kelompok tersebut maka ia tidak melakukan hak dan kewajibannya sebagai anggota kelompok dalam organisasi.

Secara etimologis kata peranan berdasar dari kata peran yang artinya : pemain sandiwar, tukang lawak. Kata “peran” ini diberi akhiran “an” maka menjadi peranan yang artinya sesuatu yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa (Poerwadarmita 1985:735). Dengan demikian kata peran berarti sesuatu berupa orang, benda atau barang yang memegang pimpinan atau karena suatu hal atau peristiwa.

Peranan menurut Jack C. Plano, mengemukakan yaitu seperangkat pelaku yang diharapkan dari seseorang yang menduduki posisi tertentu dalam suatu kelompok social.

Dari beberpa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kata dalam “peranan” bukan hanya berarti sebagai kata benda tapi juga berarti suatu tingkah atau perilaku seseorang dalam menjalani tugas dan tanggung jawabnya sehari-hari.

B. Partisipasi

Partisipasi selain telah menjadi kata kunci dalam pembangunan, juga menjadi salah satu karakteristik dari penyelenggaraan pemerintah yang baik. Secara etimologi, partisipasi berasal dari bahasa inggris “participation” yang berarti mengambil bagian/keikutsertaan. Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia dijelaskan “partisipasi” berarti: hal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan, peran serta.

Jim Iffe (2008:90) bahwa partisipasi sebagai suatu konsep dalam pengembangan masyarakat, digunakan secara umum dan luas. Partisipasi adalah sebuah konsep sentral, dan prinsip dasar dari pengembangan masyarakat karena diantara banyak hal, partisipasi terkait erat dengan gagasan HAM. Dalam pengertian ini, partisipasi adalah suatu tujuan dalam dirinya sendiri; artinya, partisipasi mengaktifkan ide HAM, hak untuk berpartisipasi dalam demokrasi dan untuk memperkuat demokrasi deliberative. Partisipasi adalah alat dan juga tujuan, karena membentuk bagian dari dasar kultur yang membuka jalan bagi tercapainya HAM.

Partisipasi harus mencakup kemampuan rakyat memengaruhi kegiatan-kegiatan sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Untuk mengukur efektifitas atau mengevaluasinya, maka harus dikenali secara jelas bahwa partisipasi sebagai suatu proses yang dinamik dan selalu berubah dari saling keberhubungan yang kompleks, ini bersifat kualitatif dan dinamis dari partisipasi, mengukurnya menuntut bahwa kita bergerak melebihi kerangka evaluasi yang lebih tradisional. Partisipasi tidak merupakan kejadian tunggal, hal itu merupakan proses yang berjalan, dinamis dan interaktif yang harus mendasari setiap kegiatan pengembangan masyarakat. Karena itu UNDP sendiri sebagai lembaga pembangunan dunia melihat penelitian kualitatif sebagai suatu cara yang lebih memadai daripada penelitian kuantitatif untuk mengevaluasi partisipasi.

C. Tokoh Masyarakat

Pengertian Tokoh Masyarakat sendiri diartikan juga dengan elit masyarakat dimana, ia bertindak mewakili masyarakat atau mengatasnamakannya. Tokoh masyarakat dapat dikategorikan atau dibagi kedalam Tokoh masyarakat formal atau elit formal dan tokoh masyarakat informal atau elit informal. Elite menurut Lipset dan Solari (2001), dengan mengutip posisi di puncak struktur-struktur sosial terpenting yaitu dalam bidang ekonomi, pemerintahan, aparat kemiliteran, politik, agama, pengajaran dan pekerjaan-pekerjaan bebas.

Setiap masyarakat baik masyarakat yang masih tradisional ataupun modern pasti akan ditemukan sekelompok kecil individu yang memerintah anggota masyarakat lainnya. Sekelompok kecil individu tadi atau lapisan elit di masyarakat tadi dapat di pilahkan menjadi elit yang sedang memerintah dan sekelompok elit yang tidak memerintah. Masyarakat terbagi menjadi dua lapis yakni masyarakat yang termasuk dalam kelompok elit yang jumlahnya sangat sedikit apabila dibandingkan dengan lapis lainnya yang terdiri dari anggota masyarakat yang tidak termasuk dalam kelompok non elit. Yakni mereka termasuk dalam kelompok elit yang memerintah (*governing elite*) yang jumlahnya lebih sedikit apabila di bandingkan dengan mereka yang termasuk dalam kelompok elit namun tidak sedang memerintah (*non governing elite*).

Tokoh atau elit masyarakat yang dibahas disini adalah elit informal, yang mana mereka dapat terdiri dari Tokoh Agama, Tokoh Pemuda, Penasehat Desa, orang yang dituakan, dan lain sebagainya.

D. Peran Tokoh Masyarakat

Partisipasi tokoh masyarakat adalah keterlibatan masyarakat yang diperankan oleh elit non formal. Jadi berbicara partisipasi tokoh masyarakat berarti berbicara partisipasi masyarakat itu sendiri. Secara umum pengertian dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah keperansertaan semua anggota atau wakil-wakil masyarakat untuk ikut membuat keputusan dalam proses perencanaan dan pengelolaan pembangunan termasuk di dalamnya memutuskan tentang rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, manfaat yang akan diperoleh, serta bagaimana melaksanakan dan mengevaluasi hasil pelaksanaannya.

Melihat dampak penting dan positif dari perencanaan partisipatif, dengan adanya partisipasi masyarakat yang optimal dalam perencanaan diharapkan dapat membangun rasa kepemilikan yang kuat dikalangan masyarakat terhadap hasil-hasil pembangunan yang ada. Geddesian (dalam Soemarmo 2005 :26) mengemukakan bahwa pada dasarnya masyarakat dapat dilibatkan secara aktif sejak tahap awal penyusunan rencana. Keterlibatan masyarakat dapat berupa: (1) pendidikan melalui pelatihan, (2) partisipasi aktif dalam pengumpulan informasi, (3) partisipasi dalam memberikan untuk rencana dan usulan kepada pemerintah.

Substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan, lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan partisipasi adalah: Pertama, bahwa partisipasi akan memungkinkan rakyat

secara mandiri (otonom) mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai kecenderungan yang merugikan. Kedua, suatu partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa partisipasi menjadi semacam garansi yang tidak diabaikannya kepentingan masyarakat. Ketiga, bahwa persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi dengan adanya partisipasi masyarakat.

Literatur klasik selalu menunjukkan bahwa partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi program pembangunan, tetapi makna dan yang terkandung dalam sekuen-sekuen partisipasi adalah voice, akses dan control (Adi, 2001:91). Pengertian dari masing-masing sekuen tersebut di atas adalah:

1. *Voice*, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.
2. *Akses*, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan serta terlibat aktif mengelola barang-barang, termasuk didalamnya akses warga terhadap pelayanan.
3. *Control*, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya.

Rumusan FAO yang dikutip Mikkelsen (2001:64) menyatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri dalam rangka pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka dengan cara memantapkan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melaksanakan persiapan, pelaksanaan dan monitoring proyek, agar mereka memperoleh informasi mengenai konteks dan dampak-dampak yang ditimbulkan dengan keberadaan proyek tersebut.

Rumusan FAO di atas menunjukkan bahwa masyarakat harus dapat membantu dirinya sendiri dalam pembangunan. Hal ini dapat dicapai apabila ada kesempatan bagi mereka untuk melakukan komunikasi dengan pihak terkait, sehingga program apapun yang direncanakan sudah selayaknya memperhatikan situasi setempat dan kebutuhan masyarakat sebagai kelompok sasaran, yang selanjutnya merupakan salah satu persyaratan agar kegiatan dapat dilaksanakan sesuai harapan dan masyarakat secara sukarela melakukan pengawasan guna dapat mewujudkan tujuan dari kegiatan yang dicanangkan. Semakin mantap tingkat komunikasi yang dilakukan maka semakin besar pula terjadinya persamaan persepsi antara para stakeholders pembangunan.

Hal ini senada sebagaimana dinyatakan Rekso Putranto (1992:51-52) bahwa peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan hendaknya masyarakat tidak dipandang sebagai obyek semata, tetapi harus dilibatkan sebagai pelaku aktif dalam pembangunan mulai sejak perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Selanjutnya hal penting yang perlu mendapat perhatian adalah hendaknya masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara proposional sesuai dengan peranannya masing-masing.

Terkait dengan masyarakat dalam tahapan kegiatan pembangunan, (Siagian,1994:108) menyatakan bahwa partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan proses dalam memilih yang diberikan semua unsur masyarakat, lembaga formal, lembaga dan lain-lain. Ini berarti partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan sangat penting, karena masyarakat dituntut untuk dapat menentukan apa yang ingin dicapai, permasalahan apa yang dihadapi, dan apa yang kiranya dapat mengatasi masalah itu, dan alternative mana yang terbaik harus dilakukan guna mengatasi permasalahan tersebut.

Disadari bahwa dalam perencanaan pembangunan peran masyarakat sangat penting, namun kemampuan masyarakat pada umumnya masih terbatas. Masih kurang dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan sehingga diskusi intensif antara pihak

berkepentingan (stakeholders), baik dari unsur pemerintah, akademi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha terkait perlu diselenggarakan untuk dapat saling melengkapi informasi dan menyamakan persepsi tentang kebijakan yang akan diputuskan oleh aparat tersebut. Pusic (dalam Adi, 2001:206-207) menyatakan bahwa Perencanaan pembangunan tanpa memperhatikan partisipasi masyarakat akan menjadi perencanaan di atas kertas.

Berdasarkan pandangannya, partisipasi atau keterlibatan warga masyarakat dalam pembangunan desa dilihat dari 2 hal, yaitu:

a. Partisipasi dalam perencanaan

Segi positif dari partisipasi dalam perencanaan adalah program-program pembangunan desa yang telah direncanakan bersama sedangkan segi negatifnya adalah adanya kemungkinan tidak dapat dihindari pertentangan antar kelompok dalam masyarakat yang dapat menunda atau bahkan menghambat tercapainya keputusan bersama. Disini dapat ditambahkan bahwa partisipasi secara langsung dalam perencanaan hanya dapat dilaksanakan dalam masyarakat kecil, sedangkan untuk masyarakat yang besar sukar dilakukan. Namun dapat dilakukan dengan sistem perwakilan. Masalah yang perlu dikaji adalah apakah yang duduk dalam perwakilan benar-benar mewakili warga masyarakat.

b. Partisipasi dalam pelaksanaan.

Segi positif dari Partisipasi dalam pelaksanaan adalah bahwa bagian terbesar dari program (penilaian kebutuhan dan perencanaan program) telah selesai dikerjakan. Tetapi segi negatifnya adalah kecenderungan menjadikan warga negara sebagai obyek pembangunan, dimana warga hanya dijadikan pelaksana pembangunan tanpa didorong untuk mengerti dan menyadari permasalahan yang mereka hadapi dan tanpa ditimbulkan keinginan untuk mengatasi masalah. Sehingga warga masyarakat tidak secara emosional terlibat dalam program, yang berakibat kegagalan seringkali tidak dapat dihindari.

Pandangan Pusic yang menekankan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa hanya pada tahap perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan nampaknya belum lengkap guna menjamin kesinambungan pencapaian tujuan pembangunan desa. Hal ini sesuai dengan pendapat Adi yang melengkapi pandangan Pusic. Menurut Adi (2001:208), dalam perkembangan pemikiran tentang partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan suatu komunitas, belumlah cukup hanya melihat partisipasi masyarakat hanya pada tahapan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Partisipasi masyarakat hendaknya pula meliputi kegiatan-kegiatan yang tidak diarahkan (non direktif).

Menurut Adi (2001:208), partisipasi masyarakat atau keterlibatan warga dalam pembangunan dapat dilihat dalam 4 (empat) tahap, yaitu:

1. Tahap Assesment

Dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumberdaya yang dimiliki. Untuk ini, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri.

2. Tahap Alternative Program atau Kegiatan

Dilakukan dengan melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi dan cara mengatasinya dengan memikirkan beberapa alternatif program.

3. Tahap Pelaksanaan(Implementasi) Program atau Kegiatan

Dilakukan dengan melaksanakan program yang sudah direncanakan dengan baik agar tidak melenceng dalam pelaksanaannya di lapangan.

4. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses, dan hasil)

Dilakukan dengan adanya pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap program yang sedang berjalan.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat dilihat bahwa partisipasi yang dilakukan masyarakat bersama-sama pihak terkait lainnya dalam berbagai tahapan pembangunan akan

menghasilkan dalam kebijakan pembangunan, dan sekaligus melatih masyarakat menjadi lebih pandai khususnya dalam penanganan masalah-masalah yang muncul di masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan diawali dengan perencanaan partisipatif. Perencanaan partisipatif adalah usaha yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mencapai kondisi yang diharapkan berdasarkan kebutuhan dan kemampuan secara mandiri. Kriteria-kriteria dari perencanaan partisipatif sebagai berikut:

1. Adanya melibatkan seluruh *Stakeholders*.
2. Adanya upaya pembangunan institusi masyarakat yang kuat dan legitimate.
3. Adanya proses politik melalui negosiasi atau urun rembuk yang pada akhirnya mengarah pada pembentukan kesepakatan bersama (*Collective Agreement*).
4. Adanya usaha pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pembelajaran kolektif yang merupakan bagian dari proses demokratisasi.

E. Pembangunan Desa

Pembangunan adalah pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga. Disamping itu pembangunan juga merupakan proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengangguran kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan (Tjokroamidjojo,1999). Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri. Adapun Ginanjar Kartasasmita (1997;9) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu: "suatu proses perubahan yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana".

Pembangunan adalah segala upaya untuk mewujudkan perubahan sosial besar-besaran dari suatu keadaan kehidupan nasional menuju keadaan baru yang lebih baik (Katz dalam Ndraha, 1985:30) perubahan sosial tersebut meliputi berbagai aspek kehidupan dan berlangsung secara terus menerus.

Dalam kebijakan pembangunan nasional di negara Indonesia, pembangunan desa merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Maka pembangunan desa oleh Mubyarto (1988:10) didefinisikan sebagai pembangunan yang berlangsung di pedesaan dan meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat yang dilaksanakan secara terpadu dengan mengembangkan swadaya gotong royong.

• Tujuan Pembangunan Desa

Salah satu faktor pembentuk kemampuan untuk untuk mewujudkan masa depan yang direncanakan menurut Bryant & White (1987:24) adalah empowerment. Dengan empowerment masyarakat mempunyai kesempatan untuk terus mengembangkan kemampuan dan peranannya dalam merencanakan dan melaksanakan sendiri perubahan-perubahan yang mereka kehendaki untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik.

Pembangunan yang terkait dengan empowerment adalah pembangunan desa, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dan lembaga desa secara simultan. Dengan tujuan itu pembangunan desa dirancang untuk menjadi landasan yang kokoh bagi pembangunan daerah dan pembangunan nasional, selain itu pembangunan desa juga diharapkan dapat menjadi pembangunan yang berwawasan masa depan dan berkelanjutan.

• Strategi Pembangunan Desa

Pada umumnya di negara-negara berkembang paling tidak berkembang dari beberapa strategi menurut Abdul Wahab (1994:45) pada umumnya ada empat strategi yang sering dipakai oleh pemerintah yang bersangkutan dalam rangka mewujudkan tujuan yang termaktub

dalam pembangunan desa yaitu : (1) The Growth (strategi pertumbuhan), (2) The Welfare Strategy (strategi kesejahteraan) (3) Resposip strategy (strategi yang tanggap kebutuhan masyarakat) dan (4) The Integreted Strategy (strategi terpadu).

Strategi pertumbuhan pada umumnya bermaksud untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis dari output pertanian dengan cara mengeluarkan sumber-sumber pada para petani yang paling mudah untuk di jangkau dalam artian psikologis maupun artian administratif.

Biasanya para petani besar, petani-petani modern yang memiliki kemampuan akses terhadap fasilitas kredit, teknologi padat modal dan pasar. Titik berat strategi ini adalah pada peningkatan jenis-jenis tanaman yang akan menghasilkan keuntungan besar, seringkali berupa tanaman yang dieksport atau konsumsi elite. Strategi kesejahteraan pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki taraf hidup dan kesejahteraan penduduk desa melalui program-program sosial berskala besar seperti misalnya pendirian klinik-klinik kesehatan dan pusat-pusat perbaikan gizi di desa.

Strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang telah dirumuskan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan sendiri oleh penduduk desa. Selain dari pada itu strategi ini untuk membantu memperlancar usaha-usaha mandiri yang dilakukan oleh penduduk desa melalui pengadaan teknonologi serta sumber-sumber yang cocok untuk kepentingan mereka, terutama yang tidak tersedia di desa.

Strategi terpadu dimaksudkan untuk mengkombinasikan unsur-unsur pokok dari pendekatan. Artinya ingin mencapai secara simultan tujuan-tujuan yang menyangkut pertumbuhan, persamaan kesejahteraan dan partisipasi. Keempat strategi tersebut apabila dicermati pada prinsipnya sulit untuk diterapkan di Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan dapat kita terapkan disini, hal ini dapat dikaitkan dengan kompleksnya kepentingan masyarakat akibat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memasyarakat melalui iforasi globalisasi dan kapasitas masyarakat semakin meningkat.

• **Proses Pembangunan Desa**

Bahwa pembangunan masyarakat desa pada hakekatnya merupakan kegiatan terencana yang mengandung tiga unsur pokok, yakni : metode, proses, dan tujuan (Islamy, 2004:35). Metode pembangunan desa yang baik harus melibatkan seluruh anggota masyarakat dan menyangkut kegiatan yang berkaitan langsung dengan kepentingan sosio-ekonomis mereka. Sebagai proses, pembangunan desa merupakan proses tranformasi budaya yang diawali dengan kehidupan tradisional yang mengandalkan kebiasaan-kebiasaan turun temurun untuk diubah menjadi masyarakat modern yang mendasarkan kemajuan hidup pada kesediaan menerima ilmu pengetahuan dan teknologi. Serta sebagai tujuan, pembangunan masyarakat desa bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup, menciptakan kesempatan yang lebih baik bagi pengembangan mata pencaharian, serta mengusahakan terciptanya prasarana fisik dan pelayanan sosial yang sama dengan daerah perkotaan.

Pembangunan partisipatif adalah pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat dengan melibatkan sebesar mungkin peran masyarakat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, hingga monitoring dan perkembangannya. Pendekatan ini dimulai dengan keikutsertaan masyarakat sebagai pelaku utama (stakeholders) dalam perencanaan pembangunan karena masyarakat diyakini paling mengetahui dan memahami segala kebutuhan, pola pikir, sistem nilai, perilaku, dan adat istiadat serta kebiasaan di lingkungannya.

Konsep pembangunan desa mencakup 5 dimensi sebagai pilar utama yaitu menyangkut tata ruang desa, perekonomian desa, sosial budaya desa, mitigasi bencana, lingkungan hidup.

- a. Tata ruang desa : rehabilitasi, rekonstruksi dan pengembangan desa. Selain itu, juga mampu menampung pertumbuhan ruang di masa datang secara fleksibel dan mampu

- menampung kebutuhan perbaikan struktur tata ruang desa melalui konsolidasi lahan (jika diperlukan).
- b. *Perekonomian Desa* : meningkatkan penghidupan masyarakat dan pembangunan sarana ekonomi berbasis potensi lokal, pengembangan usaha mikro, kelembagaan ekonomi dikaitkan dengan sumber daya manusia.
 - c. *Sosial Budaya Desa* : pembangunan pendidikan, sosial dan penguatan adat istiadat setempat dalam rangka pengembangan partisipasi masyarakat yang melibatkan segenap lapisan masyarakat, termasuk di dalamnya kelompok anak-anak pemuda dan wanita.
 - d. *Mitigasi bencana* : penataan ruang desa dengan fungsi khusus yaitu mitigasi bencana, berupa pembangunan daerah-daerah yang rawan bencana dan tempat-tempat yang digunakan untuk penampungan evakuasi warga ketika terjadi bencana.
 - e. *Lingkungan hidup* : penataan lingkungan yang menjaga keseimbangan holistik antara kawasan budidaya dengan kawasan lindung dalam upaya menjaga kelestarian penghidupan sebagian besar masyarakat. Penataan dilakukan juga terhadap pengelolaan di sektor pertanian, termasuk perkebunan, perikanan, kehutanan untuk meminimalisir ketidakseimbangan ekosistem.

Susetiawan (2011), Desa itu menunjuk wilayah, yang didiami oleh masyarakat, yang di dalamnya terdapat sumber-sumber produksi, yang didalamnya juga memiliki tata kelola (governance), diikat oleh aturan main yang disepakati bersama oleh masyarakatnya dan ada pengaturan untuk menegakkan aturan, yang sering disebut dengan istilah pemerintahan. Dalam konteks ini, dulu desa itu adalah negara. Sebelum negara monarki atau sekarang bergeser menjadi negara kesatuan yang mengintegrasikan berbagai wilayah itu ada, desa sudah ada lebih dulu. Oleh sebab itu desa sudah sejak lahirnya merupakan wilayah yang bersifat otonom. Misalnya pada jaman kerajaan, pemerintahan pusat (kerajaan) tidak banyak campurtangan dalam pengaturan desa, namun hal penting yang hendak diperoleh dari proses pengintegrasian ini adalah pusat mendapatkan upeti dari wujud kesetiaan masyarakat yang terintegrasi terhadap negara.

Dalam proses panjang, ketika pembangunan itu dilakukan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, kondisinya menjadi berbalik, desa menjadi bagian dari pemerintahan pusat dengan posisi pinggiran dan kehilangan otonomi. Selanjutnya desa menjadi obyek pembangunan semua lembaga pemerintahan di atasnya sehingga tidak memiliki kewenangan dalam mengatur rumah tangganya sendiri. Pusat menjadi sangat kokoh, melakukan sentralisasi, mendominasi pengaturan segala macam sumber yang terletak di desa dan lebih dari itu, yakni mengambil alih pemilikan desa menjadi pemilikan pusat. Salah satu contoh, UU pertambangan bernuansa pusat dari pada daerah.

Tesis masa lalu, kuatnya pemerintah pusat sebagai actor pengintegrasian lokal, secara otomatis akan menjawab kuatnya perkembangan lokal. Sama halnya, kuatnya pertumbuhan ekonomi nasional diasumsikan akan menjawab perkembangan kesejahteraan lokal melalui proses trickledown effect. Asumsi ini gagal menjelaskan perkembangan masyarakat desa. Keadaan yang berlangsung sebaliknya, yakni kuatnya pusat justru melakukan apropriasi atau pengalihan lokal oleh pusat. Pikiran paradigmatic ini garus doitinggalkan dan diganti sebaliknya, kuatnya pertumbuhan dan perkembangan lokal (desa) akan menjadi ciri pertumbuhan dan perkembangan nasional. Kesulitan terbesar untuk melakukan pembaharuan ini karena pusat memiliki kepentingan untuk menjadikan desa sebagai obyeknya dalam proses pembangunan. Watak aparaturnegara tidak berubah bahkan masuk ke dalam ruang dimana mereka miskin konsep pembangunan dan hanya menjalankan pertanggungjawaban keuangan proyek, yang akan merasa selesai kalau keuangannya tidak dipersoalkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (Susetiawan, 2011).

Perilaku ini sulit dibendung dan dipatahkan, kalau ada perubahan hanya terbatas pada wacana akan tetapi perilakunya tidak banyak mengalami perubahan. Keadaan ini semua dapat terjadi karena desa tidak memiliki jamanan perlindungan dari siapa pun yang hendak memiliki

kepentingan terhadap desa seperti birokrasi pemerintahan pusat yang dilakukan oleh departemen teknik, para pebisnis dan kemungkinan besar lembaga swadaya masyarakat, meskipun tidak semua Lembaga Swadaya Masyarakat itu sama. Ini lah sebabnya sehingga desa kehilangan kedaulatan dan kemandirian untuk mengatur dan mengkreasikan sumber dan potensi yang tersedia sesuai dengan kepentingannya. Desa justru mengabdikan kepada kepentingan lain karena merekalah yang memiliki dan mengimplementasikan program pembangunan pemerintah pusat

Pembangunan desa yang berkelanjutan merupakan pembangunandesanya yang tidak merusak lingkungan, memberikan hak kedaulatan untuk mengatur dirinya sendiri. Pembangunan desa yang berkelanjutan bukan berpijak kepada konsep model produksi kapitalis dimana desa hanya sebagai ajang pasarnya alat-alat pertanian yang diproduksi oleh industri alat pertanian yang membebani masyarakat. Jika keliru dalam memaknai terbentuknya UU Desa maka desa akan masuk perangkat keberlanjutannya pasar global dan bukan keberlanjutan kedaulatannya sendiri.

Oleh sebab itu dasar filosofi memberikan pentingnya pengaturan desa melalui UU menjadi sangat vital, yakni UU Desa itu diwujudkan untuk membela kepentingan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Jika hal ini tidak dipahami maknanya maka pembangunan desa akan memasuki ruang yang kurang lebih sama dengan proses pembangunan masa lalu, dimana desa sudah diserahkan kepada kepentingan global, sedang negara sebagai agen atau kepanjangan kepentingan model produksi kapitalisme global yang wataknya neoliberal. Pasar bebas menjadi alatnya untuk menguasai sumber-sumber produksi yang hampir semuanya terletak di pedesaan. Paha ini sangat anti terhadap perlindungan negara, kalau perlu negara menjadi alatnya bisnis. Fungsi negara bukan mengatur bisnis akan tetapi negara diatur bahkan alatnya bisnis. Kegagalan negara membangun bangsa karena negara tidak mampu mengatur para pebisnis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. (Moleong, 2006), dengan fokus penelitian yaitu mengidentifikasi bagaimana peranan dari tokoh masyarakat yang ada di Desa Bebu Kecamatan Tamako dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada proses pembangunan desa. Partisipasi diukur dari setiap tahapan pembangunan di desa (Adi 2001:208), yaitu: tahap assessment, tahap penentuan alternative program atau kegiatan, tahap pelaksanaan (Implementasi) program atau kegiatan, dan tahap evaluasi (termasuk evaluasi input, proses, dan hasil).

Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian diolah melalui beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan reduksi data, kemudian dilanjutkan dengan melakukan display data, dan diakhiri dengan melakukan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara historis, desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum bangsa ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang paling kongkret. Pembangunan biasanya didefinisikan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara atau bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan

bangsa, misalnya pembangunan dibidang ekonomi, apabila pembangunan ekonokmi telah berjalan dengan baik maka pembangunan dibidang lain akan berjalan dengan baik

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan infrastruktur fisik daerah sangat diharapkan guna memberikan masukan kepada pemerintah daerah apa sebenarnya yang mereka butuhkan. Atau, partisipasi juga harus ada ketika pemerintah daerah membutuhkan sebagian dari hak milik mereka dengan ditukar dengan nilai yang sepadan.

Partisipasi bisa muncul melalui kelompok-kelompok lembaga swadaya masyarakat, kelompok-kelompok adat, ataupun satuan-satuan masyarakat yang lebih kecil lainnya. Adanya dukungan dari mereka merupakan dorongan bagi pemerintah daerah untuk mengklasifikasikan sekaligus memenuhi kebutuhan dasar mereka. Karena itu, tanpa adanya partisipasi, maka dipastikan suatu daerah tidak akan bisa melaksanakan pembangunan daerah dengan baik: apapun bentuk pembangunan yang akan dikerjakan.

Tokoh masyarakat adalah salah satu potensi dalam pembangunan untuk menggerakkan masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembangunan desa agar terciptanya pembangunan nasional. Tokoh masyarakat yang dimaksud adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh pendidikan, tokoh pemuda dan tokoh-tokoh lainnya. Tokoh masyarakat dalam suatu desa dapat dikatakan sebagai pusat komando masyarakat yang ditempat masyarakat bertanya, tempat meminta petunjuk, tempat masyarakat menyampaikan ide-ide atau masukan demi meningkatkan taraf hidup warga masyarakat desa tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian dengan focus yang telah ditentukan yaitu bagaimana peran tokoh masyarakat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat pada pembangunan di Desa Bebu Kecamatan Tamako Kabupaten Kepulauan Sangihe, yang dilihat dari 4 (empat) tahap, dapat digambarkan, sebagai berikut:

1. Tahap Assesment

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah kerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Kepala Desa juga seharusnya berperan dalam membangun kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi terhadap program-program yang dilakukan oleh pemerintah desa. Karena masyarakat juga bagian dari suksesnya program desa, masyarakat juga mempunyai peranan terhadap tercapainya tujuan dari pembangunan.

Sebelum diadakan proses perencanaan secara formal, maka dilakukan dengan mengidentifikasi masalah dan sumberdaya yang dimiliki. Untuk ini, masyarakat dilibatkan secara aktif melihat permasalahan yang sedang terjadi, sehingga hal tersebut merupakan pandangan mereka sendiri.

Kondisi geografis desa Bebu memiliki banyak perkebunan serta iklim yang mendukung dalam hal perkebunan, masyarakat desa Bebu banyak yang berprofesi sebagai petani, kondisi ini tidak didukung oleh pembangunan infrastruktur jalan yang belum memadai masih dalam tahap pembangunan dan perbaikan, padahal jalan yang menghubungkan antara desa dengan perkebunan warga sangat penting mengingat penangkutan hasil-hasil pertanian ke desa.

Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur sangat penting dalam menunjang kelancaran pembangunan, dalam teori partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pembangunan bukan hanya dimulai pada saat rapat perencanaan ataupun pada implementasinya tetapi dalam hal ini masyarakat seharusnya berpartisipasi pada saat pengidentifikasian masalah.

Dari hasil wawancara dengan para informan didapati hasil sebagai berikut:

Informat bapak P.T. (masyarakat desa Bebu yang berprofesi sebagai petani), mengatakan:

“Dalam pembangunan desa peran dari tokoh masyarakat itu sangat penting karena mereka kebanyakan orang-orang netral dan disegani di desa. Oleh sebab itu biasanya kalau ada kerjabakti atau pembangunan di desa tokoh masyarakat dilibatkan sama di desa bebu ini. saya sebagai masyarakat desa Bebu juga sudah melihat permasalahan yang

dihadapi oleh masyarakat, apalagi saya sebagai petani sangat menginginkan adanya pembangunan jalan, drainase yang baik, saya sering berkonsultasi dengan kepala jaga bahkan kepala desa, saya sering menyampaikan keinginan saya, namun baru beberapa waktu lalu proyek ini direalisasikan. dalam hal ini peranan dari tokoh masyarakat juga bukan sekedar menggerakkan masyarakat tapi juga diharapkan mampu membawa aspirasi dan keinginan masyarakat kepada pemerintah."

Hal senada juga dikatakan oleh bapak J.O. seorang masyarakat desa Bebu, beliau mengatakan:

"pada dasarnya kami masyarakat, akan sangat menghargai pemerintah dengan pemberian diri kami namun juga perlu adanya dorongan dari orang lain untuk membuat kami merasa dihargai. Tokoh masyarakat adalah orang yang biasanya dekat dengan masyarakat seperti tokoh agama, orang terpandang desa dan kami juga ingin didengarkan oleh pemerintah, oleh sebab itu sering kami membicarakan mengenai pembangunan desa dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa Bebu ini sebelum nantinya dibawa di rapat desa."

Menurut penuturan seorang tokoh agama di desa Bebu Ibu. K.W. mengatakan:

"Mengenai pembangunan di desa bebu memang kami sebagai tokoh agama tidak terlibat langsung, namun kami merasa terpanggil untuk melayani masyarakat lewat peran kami, yaa kami beberapa kali mendengar aspirasi masyarakat mengenai pembangunan jalan, got dan lain-lain, kami sering juga menyampaikannya ke pemerintah desa dan pihak terkait karena kami sering ketemu. Begitu juga saat ada kegiatan kerja bakati kami juga sering dimintakan oleh kepala desa untuk mengajak masyarakat ikut serta."

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa peranan tokoh masyarakat masyarakat dalam pembangunan dapat dikatakan baik yakni tokoh masyarakat telah peka terhadap fenomena serta realita yang sedang terjadi disekitar mereka, bahkan telah memberikan masukan kepada pihak pemerintah akan hal tersebut.

2. Tahap Penentuan Alternative Program atau Kegiatan

Dalam setiap program yang telah direncanakan oleh pemerintah wajib di sosialisasikan kepada masyarakat atau dalam setiap penyusunan program baik dari tingkat pusat sampai pada tingkat desa seharusnya masyarakat juga mempunyai andil. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya merupakan suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela dari dalam dirinya maupun dari luar dirinya dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan

Pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di Bebu Kecamatan Tamako, pembangunan infrastruktur yang akan dilaksanakan tidak langsung diputuskan secara sepihak saja oleh pemerintah desa melainkan dengan melakukan penggalian gagasan yang mendalam dengan melibatkan masyarakat secara keseluruhan agar semua kebutuhan masyarakat dapat tertampung semua, seperti yang telah dikemukakan oleh Bapak K.I. Tokoh politik desa Bebu mengatakan:

"proses pengidentifikasian alternative program, digali dari setiap jaga, apakah di satu jaga itu dilakukan hanya sekali atautkah lebih dari sekali dengan titik lokasi yang berbeda, pemerintah sering berkunjung ke jaga-jaga ataupun memanggil kepala jaga untuk menanyakan perihal permasalahan yang dihadapi serta program pembangunan. Sebagai tokoh masyarakat juga kami telah menjangir aspirasi masyarakat terlebih dahulu sehingga kami mampu menyampaikan hal tersebut kepada pemerintah dan dapat mewakili masyarakat setempat"

Demikian juga yang dikemukakan oleh salah seorang masyarakat Bebu :

“penggalan gagasan atau rancangan program dilaksanakan mulai tingkat dusun hingga tingkat desa, masyarakat turut terlibat dalam hal tersebut, hanya saja masyarakat sering tidak tertarik karena banyaknya kesibukan yang dilakukan seperti pekerjaan, pelayanan gereja, jadi tidak banyak masyarakat yang terlibat dalam proses perumusan program”

Ditambahkan lagi bahwa:

“Informasi tersebut menunjukkan bahwa proyek yang dilaksanakan benar merupakan proyek yang idenya digali dari masyarakat Bebu dan telah sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dari proses penggalan gagasan tersebut, maka lahirlah beberapa usulan yang akan mewakili kebutuhan masyarakat, yang selanjutnya akan diranking sesuai dengan skala kebutuhan masyarakat dan dimusyawarahkan dalam musyawarah tingkat desa. Beberapa proyek yang telah dan tengah dilaksanakan adalah proyek pembangunan jalan kekebun, drainase serta pembangunan balai desa.”

Dalam pelaksanaan proyek secara teknis juga tidak dapat terlepas dari pemanfaatan sumberdaya yang terdapat di desa bersangkutan. Hal ini dikecualikan jika sumberdaya yang dimaksudkan tidak terdapat di desa, seperti yang dijelaskan oleh Kepala BPD Desa Bebu:

“Semua pekerja proyek adalah orang asli desa, misalnya bagi yang memiliki keahlian sebagai tukang batu, silahkan kerjakan yang bagian pemasangan batu, lagian tetap diberi upah kerja. Dan sebagai partisipasi mereka, maka upah yang mereka minta pun tidak seperti jika mereka bekerja biasanya”

Hal senada juga dikemukakan oleh Kepala Desa Bebu :

“Untuk masalah pengerjaan yang sifatnya membutuhkan keahlian, maka dicari pula masyarakat di desa ini yang betul-betul ahli dalam bidang tersebut apalagi dana pembangunan sekarang didanai oleh dana desa sehingga semua dibayarkan kepada masyarakat yang kerja”

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa pelaksanaan pembangunan tersebut memang menekankan pada pemberdayaan masyarakat dan tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan adanya sosialisasi yang dilakukan, karena tanpa adanya sosialisasi, maka kendati terdapat minat masyarakat dalam berpartisipasi akan tetap menyurutkan hal tersebut.

Dengan adanya sosialisasi yang baik, maka informasi yang didapatkan dari sosialisasi akan dapat menjadi pemicu terhadap timbulnya partisipasi. Dari penelitian di lapangan ditemukan bahwa di Bebu sifat gotong royong masyarakat masih tinggi, hanya saja bagaimana peran dari pemerintah desa dalam mengarahkannya dan mensosialisasikan kegiatan yang akan dilaksanakan, seperti yang dikemukakan oleh pemuda U.R. salah seorang tokoh masyarakat pemuda: *“Semangat gotong royong di Bebu ini masih sangat kental, dan mereka sangat bersemangat apabila mereka dipanggil untuk turut berpartisipasi dalam setiap kegiatan.”*

3. Tahap Pelaksanaan (Implementasi) Program atau Kegiatan

Pembangunan desa merupakan bagian integral dari sasaran pembangunan nasional. Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah warga masyarakat Indonesia seluruhnya, dimana warga masyarakat tersebut merupakan subjek dan objek pembangunan nasional, karena pembangunan tersebut berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dengan kata lain, keberhasilan pembangunan desa tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat desa. Pelaksanaan pembangunan desa, perwujudannya dapat bermacam-macam, seperti pelayanan kesehatan, penyuluhan, bantuan teknis, penyediaan kebutuhan air, listrik, jalan, perumahan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

Pembangunan masyarakat memiliki sebuah komponen esensial dari setiap prosesnya yakni menghargai local knowledge atau kearifan lokal, dan dapat dirangkum dengan frasa 'masyarakat paling tahu'. Di atas segalanya, anggota masyarakat memiliki pengalaman dari masyarakat tersebut, tentang kebutuhan dan masalah-masalahnya, kekuatan dan kelebihannya, dan ciri khasnya (Tesoriero, 2008). Pembangunan masyarakat tentu tidak lepas dari peran tokoh masyarakat adat didalamnya, Tokoh masyarakat ialah seseorang yang disegani dan dihormati secara luas oleh masyarakat dan dapat menjadi faktor yang menyatukan suatu bangsa-negara (Surbakti, 1992).

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan terlihat pembangunan tersebut sementara berjalan seperti jalan ke kebun, Karena jaraknya yang cukup jauh jadi memakan waktu dan dana yang cukup banyak, lain halnya dengan pembangunan drainase, pengerjaan proyek ini telah selesai dan proses pengerjaannya melibatkan masyarakat setempat. Hal ini dikatakan oleh Kepala Desa Bebu, beliau mengatakan :

“Pengerjaan Pembangunan Infrastruktur jalan desa sementara dilaksanakan, yang mengerjakannya adalah masyarakat sekitar ada beberapa yang memang memberikan partisipasi tenaga ataupun sumbangan uang, masyarakat disini cukup partisipatif dalam hal pembangunan, hanya saja tidak semua yang betul-betul berpartisipasi masih ada saja masyarakat yang memang tidak berpartisipasi, alasannya beragam-ragam dari pekerjaan, kesehatan ataupun karena memang malas, hal tersebut berlaku untuk kegiatan kerjabakti dan dananya dari swadaya masyarakat, namun sekarang sudah ada dana desa dan pembangunannya kebanyakan dari dana desa.”

Hal senada juga dikatakan oleh Bapak L.T. seorang masyarakat desa Bebu beliau mengatakan:

Dalam tahap pelaksanaan program pembangunan infrastruktur memang melibatkan masyarakat pada umumnya, tetapi saya melihat ada beberapa masyarakat yang tidak berpartisipasi secara langsung, hal ini saya nilai selain dari masyarakat, pemerintah juga harus pro aktif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mendorong, mengunjungi ataupun memberikan sanksi yang tegas, terlihat pemerintah tidak pernah memberikan peringatan ataupun sanksi social kepada masyarakat yang tidak berperan dalam pembangunan terkadang pemerintah desa hanya mengandalkan masyarakat yang betul-betul rajin dan berpartisipasi kebanyakan adalah petani.”

hasil penelitian diatas, dapat dikatakan dari aspek sosiologis, masyarakat terkadang berpartisipasi hanya karena ada pendapatan atau upah yang didapat, hal ini terlihat wajar namun juga sekaligus memprihatinkan, disisi lain pemerintah dianggap gagal dalam meningkatkan partisipasi masyarakat.

4. Tahap Evaluasi (termasuk evaluasi input, proses, dan hasil)

Peran berhubungan dengan status seseorang pada kelompok tertentu atau situasi sosial tertentu yang dipengaruhi oleh seperangkat harapan orang lain terhadap perilaku yang seharusnya ditampilkan oleh orang yang bersangkutan. Kaitan point tersebut dengan temuan lapangan yakni peran tokoh masyarakat adat dengan status tokoh adat di kalangan masyarakat sangat berpengaruh, terkait apa yang mereka lakukan, apa yang mereka sampaikan, apa yang mereka tunjukkan. Dan terhadap itu pula munculah harapan-harapan untuk selalu dari segi positif guna dapat dijadikan contoh bagi masyarakat yang mencontoh dari apapun yang bersumber dari mereka.

Pada tahap ini masyarakat ikut mengawasi dari laporan kegiatan dari segi program, waktu maupun dana yang digunakan. Di desa Bebu peran masyarakat dalam tahap evaluasi ini tidak terlalu terlihat hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yakni informan

masyarakat salah satunya bapak Romel Rondonuwu seorang masyarakat desa Bebu mengatakan:

“Kalau dalam melihat hasil akhir suatu proyek di Desa ini, saya tidak terlalu memikirkannya, yang terpenting hasil yang dikerjakan sudah selesai dan dapat dinikmati masyarakat, karena walaupun ada penyimpangan masyarakat dapat melihat.”

Hal senada juga di katakana oleh ibu Conny O yang juga masyarakat desa Bebu beliau mengatakan :

“Pembangunan Infrastruktur di Desa Bebu ada beberapa yang dari pemerintah pusat seperti pembangunan drainase, walaupun mengalami kendala keuangan, waktu pelaksanaan kami memakluminya yang terpenting hasil akhirnya bisa dinikmati selebihnya tinggal pertanggungjawaban mereka dengan Negara. Begitu juga dengan pembangunan jalan ke kebun dan balai desa, masyarakat dapat menilai hal tersebut karena yang mengelola juga adalah masyarakat desa.”

Dari hasil wawancara kepada informan diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahap pelaksanaan evaluasi kerja, masyarakat desa Bebu tidak terlalu peduli yang terpenting adalah hasil akhir dari pekerjaan, hal ini tentu tidak terlalu baik mengingat peran masyarakat dalam tahap evaluasi suatu pembangunan sangat berpengaruh untuk mencegah terjadinya korupsi dalam pelaksanaan suatu program.

PENUTUP

Peran tokoh-tokoh masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan hasil pembangunan, dan evaluasi keberhasilan pembangunan desa Bebu Kecamatan Tamako belum berjalan baik. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana keterlibatan masyarakat pada proses pembangunan di desa Bebu, yang mana masyarakat hanya mau berpartisipasi jika diberi upah saja. Dari sisi pengawasan atau evaluasi masyarakat terhadap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan terlihat masih rendah, terbukti masih banyak masyarakat yang masa bodoh atau merasa tidak perlu untuk mengetahui laporan dari pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab, Solichin. 1994. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT RajaGrafindo. Persada.*
- Adi, Isbandi Rukminto. 2001. Pemrberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan. Intervensi Komunitas. Jakarta: Lembaga Penelitian FE-UI.*
- Bryant, Coralie & Louise G. White. 1987. Manajemen Pembangunan Untuk. Negara-negara Berkembang. Jakarta: LP3ES*
- Ife, Jim, dan Frank Tesoreiro. (2008). Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi Community Development, Yogyakarta: Pustaka Pelajar*
- Islamy, M. Irfan. (2004). Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. Jakarta: Bumi Aksara.*
- Tjokroamidjojo, B. (1996), Perencanaan Pembangunan, Edisi ke -19, PT Gunung. Agung , Jakarta.*
- Kartasmita Ginanjar, 1997, Administrasi Pembangunan, LP3ES, JakaLingkungana.*
- Lipset dan Solari. (2001). Consensus and Conflict Essay In Poitics Sociology. New Jersey. Oxfort Univesity Press.*
- Mikkelsen, Britha. 2001. Metode Penelitian Partispatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.*
- Moleong, j, Lexy. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja. Rosdakarya.*

- Mubyarto dan Sartono Kartodirdjo, 1988. *Pembangunan Pedesaan di Indonesia*, Liberty Yogyakarta.
- Nazir. Moh. 1983. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Ndraha, Taliziduhu. 1985. *Pembangunan Desa dan Administrasi Pemerintah Desa*. Jakarta: Yayasan Karya Dharma.
- Poerwadarminta*. (1985). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai.
- Putranto Rekso, 1992. *Manajemen Proyek Pemberdayaan*. Jakarta. Lembaga Penerbitan FE-UI
- Siagian, Sondang P, 1994, *Administrasi Pembangunan, Gunung Agung*
- Singarimbun dan Sofian Effendi. 1982. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES).
- Soemarmo. 2005. *Analisis Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Pada Proses Perencanaan Pembangunan Di Kota Semarang (Studi Kasus Pelaksanaan Penjaringan Aspirasi Masyarakat Di Kecamatan Banyumanik)*, Tesis, Magister Administrasi Publik, Universitas Diponegoro, Semarang.